

## RINGKASAN

Semakin meningkatnya sengketa merek yang diajukan melalui gugatan pembatalan merek pada Pengadilan Niaga atas dasar adanya merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau merek terkenal milik pihak lain, telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi pemilik merek. Pada gugatan pembatalan merek tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ditarik sebagai pihak Turut Tergugat dalam surat gugatan meskipun perbuatannya dalam pelaksanaan pendaftaran merek telah menimbulkan kerugian kepada pemilik merek berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum Pemeriksa dalam Pelaksanaan Tahapan Pemeriksaan Substantif kepada Menteri pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pendaftaran merek di Indonesia dan menganalisis kedudukan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam gugatan pembatalan merek dagang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), menggunakan spesifikasi penelitian preskriptif berdasarkan data sekunder berupa sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan secara studi pustaka (*bibliography study*) melalui analisis kualitatif yang diteliti dengan logika induktif menggunakan metode interpretasi/penafsiran gramatikal dan sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, pertanggungjawaban hukum Pemeriksa dalam Pelaksanaan Tahapan Pemeriksaan Substantif atas pendaftaran merek di Indonesia dibebankan kepada Menteri pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bentuk pembatalan atau penghapusan pendaftaran merek dengan mencoret merek yang bersangkutan, sebagaimana kedudukan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam gugatan pembatalan merek dagang *Profil Tank* dan *Creed Millesime* yang diajukan pada Pengadilan Niaga memenuhi kualifikasi kedudukan hukum sebagai Tergugat (saat ini ditarik sebagai Turut Tergugat).

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Merek Dagang, Pembatalan Merek, *Profil Tank*, *Creed Millesime*.

## SUMMARY

*The increasing number of trademark disputes filed through trademark cancellation lawsuits in the Commercial Court on the basis of registered trademarks that are similar in essence or in whole to registered trademarks belonging to other parties or well-known trademarks belonging to other parties, has caused both material and immaterial losses to trademark owners. In the trademark cancellation lawsuit, the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia cq. The Directorate General of Intellectual Property was withdrawn as a co-defendant in the lawsuit even though its actions in implementing the trademark registration had caused losses to the trademark owner based on the applicable laws and regulations.*

*The aim of this research is to analyze the legal responsibility of the Examiner in the Implementation of the Substantive Audit Stages to the Minister at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia for trademark registration in Indonesia and to analyze the legal position of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia cq. Directorate General of Intellectual Property in a trademark cancellation lawsuit. The type of research used is normative legal research with the method of statute approach and conceptual approach using prescriptive research specifications based on secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal sources collected through bibliography study through qualitative analysis which is researched with inductive logic using interpretation/interpretation methods grammatical and systematic so that conclusions can be drawn using deductive methods.*

*Based on the results of the research, The legal responsibility of the Examiner in the Implementation of the Substantive Examination Stages for trademark registration in Indonesia is borne by the Minister at the Ministry of Law and Human Rights in the form of canceling or deleting the trademark registration by crossing out the trademark in question, as per the legal position of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia cq. The Directorate General of Intellectual Property in the lawsuit for the cancellation of the Tank Profile and Creed Millesime trademarks filed at the Commercial Court meets the legal status qualifications as Defendant (currently withdrawn as Co-Defendant).*

**Keywords:** *Intellectual Property Rights, Trademarks, Brand Cancellation, Profil Tank, Creed Millesime.*